

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH di BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

Iin Indarti¹, Retno Ginanjar², Tjandra Tirtono³

¹STIE Widya Manggala Semarang

JL.Sriwijaya No 32 & 36 Semarang, iinindarti@widyamanggala.ac.id

²STIE Widya Manggala Semarang

JL.Sriwijaya No 32 & 36 Semarang, retnoginanjara@widyamanggala.ac.id

³STIE Widya Manggala Semarang

JL.Sriwijaya No 32 & 36 Semarang, tjandrirtirtono@widyamanggala.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 06 September 2024

Received in revised form 11 October 2024

Accepted 31 October 2024

Available online 31 October 2024

ABSTRACT

An The purpose of this research is to examine the implementation of the Regional Financial Accounting System BPKAD of Central Java Province based on the quality of the Central Java Provincial Government's financial reports, the Regional Financial Accounting System and the internal control of the Regional Government of Central Java Province. The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Central Java Province was formed based on the Regional Regulation of the Province of Central Java Number 9 of 2022 dated 9 November 2022 concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus of the Province of Central Java and Governor Regulation Number 82 of 2022 dated 15 December 2022 concerning Organization and Administration of Regional Financial and Asset Management Agency of Central Java Province. The respondents in this study were employees or staff in the finance or accounting department at SKPD Central Java Province as many as 48 respondents. The results of this study, the suitability of the Financial Accounting System with the Financial Accounting Standards, obtained an average respondent's answer of 4.4166, which means that the suitability of the Financial Accounting System with Financial Accounting Standards is good. Accounting recording procedures with Financial Accounting Recording with 4 question items, 48 respondents also gave good answers, with an average answer of 4.6666. The making of periodic reports of Financial reports from 48 respondents with 4 question items also gave good results, with an average of 4.5103 respondents' answers. The description of the quality of the financial statements is also good viewed from a reliable, relevant, understandable, and comparable perspective because the average respondent's answer is 4.171 with 11 question items.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Quality of Regional Government Financial Report, Financial Accounting Standards

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan pengendalian intern Pemerintah Daerah Pusat Provinsi Jawa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai atau staf bagian keuangan atau akuntansi pada SKPD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 48 responden. Hasil penelitian kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,4166 yang berarti kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah baik. Prosedur pencatatan akuntansi dengan Pencatatan Akuntansi Keuangan dengan 4 item pertanyaan, jawaban baik juga diberikan oleh 48 responden dengan rata-rata jawaban 4,6666. Pembuatan laporan berkala Laporan Keuangan dari 48 responden dengan 4 item pertanyaan juga memberikan hasil yang baik, dengan rata-rata jawaban responden sebanyak 4.5103. Gambaran kualitas laporan keuangan juga baik dilihat dari sudut pandang yang dapat diandalkan, relevan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan karena rata-rata jawaban responden adalah 4.171 dengan 11 item pertanyaan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Keuangan

1. PENDAHULUAN

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan untuk sektor pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penerapan Sistem Akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang di tandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan terhadap hukum dan pada akhirnya di wujudkan dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memenuhi kriteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan

Reformasi menjadi gerbang awal bagi masyarakat untuk mulai menyampaikan aspirasinya terhadap penyelenggaraan negara. Reformasi yang didasarkan pada persamaan prinsip menghasilkan tuntutan demi tuntutan disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan negara menjadi lebih baik dalam semua aspek. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara menjadi poin yang selalu didengungkan oleh masyarakat tidak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas yang dimaksudkan ialah adanya akses yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan negara dan pemerintah selaku penyelenggara negara sehingga pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang disampaikan masyarakat tidak tertuju hanya kepada pemerintah pusat tetapi pemerintah daerahpun menjadi bagian dari tuntutan tersebut.

Sejalan dengan reformasi di segala sektor pemerintahan termasuk yang di tandai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka tuntutan sampai besar kepada sektor publik termasuk pemerintah daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas setiap rupiah dana yang di terima dari masyarakat. Dalam pengelolaan dan masyarakat maka ilmu Akuntansi paling cepat dapat diterima sebagai salah satu alat/media yang dapat di gunakan untuk dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas dimaksud, melalui suatu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan. Tentunya hal tersebut dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu membuat, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

Dalam PSAP 01 dijelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Perwujudan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Namun kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi faktor yang lain yaitu sistem pengendalian intern.

Banyaknya kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tugas bagi pemerintah itu sendiri yang menjadikan pembaharuan terhadap sistem akuntansi pemerintah menjadi tidak berarti ketika faktor-faktor yang lain tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Terdapat beberapa kelemahan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah terutama berkenaan dengan sistem pengendalian antara lain berupa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Dari ketiga kondisi tersebut, kelemahan di dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan memberikan kontribusi tertinggi bagi laporan keuangan pemerintah yang buruk. Hal ini merupakan problem besar bagi pemerintah daerah.

Kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Masalah utama di dalam laporan keuangan pemerintah daerah tentu berkaitan dengan aset tetap. Kenyataannya, banyak aset tetap dalam SKPD yang belum dilaporkan kepada SKPKD serta kepemilikan aset pemerintah daerah yang tidak jelas. Sebagai contoh adanya pelimpahan kewenangan sekolah SMA, SMK dan SLB kepada Pemerintah Provinsi dan harus tercatat seluruhnya. Sehingga masing-masing sekolah harus secara tertib melaporkan perkembangan asetnya kepada BPKAD Bidang Aset melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset agar memudahkan dalam pendataan aset, penentuan lokasi aset, kondisi aset, penghapusan aset hingga laporan data aset.

Tentu ada banyak penyebab lain selain yang disebutkan di atas yang menjadikan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dinilai tidak wajar oleh BPK. Oleh karena itu, jajaran pemerintah daerah perlu bekerja keras agar dapat memperoleh opini WTP atas laporannya sehingga akan mengakibatkan pemerintah daerah memperoleh insentif tambahan dari pemerintah pusat dan dengan demikian kualitas pembangunan di daerah menjadi lebih baik yang tentu akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia terutama di daerah-daerah.

Pentingnya dilakukan penelitian ini bahwa masyarakat dikalangan umum mengerti bahwa laporan keuangan pemerintahan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Dalam pelaporan keuangan pemerintah selalu berusaha agar laporan keuangan dapat dipahami oleh siapapun dan berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik setelah pemeriksaan dari auditor. Harapannya sehingga masyarakat dapat memonitor laporan keuangan kapan saja. Peneliti memilih BPKAD Jawa Tengah dikarenakan sesuai domisili peneliti sehingga data yang diperoleh adalah data yang terbaru dan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas laporan Keuangan Pemerintah daerah ditentukan oleh banyak faktor. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud seperti suatu kegiatan (Psychologymania, 2008).

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para

pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan dalam PSAP 01 adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

2.1.2. Peranan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki peranan sebagai berikut : .

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan

2.1.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan prasyarat normsatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut :

A. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

2.1.4 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan sistem internal sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan melalui efektifitas dan efisiensi operasi, pelaporan dan kepatuhan.

Sedangkan definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ialah sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Rasdianto (2013:6) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah : “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

b. Menentukan Pihak-Pihak Terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

c. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

d. Menentukan Jurnal Standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

e. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

2.1.6. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut: “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Sesuai dengan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, SAP Berbasis Akrua adalah SAP

yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Sedangkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

10. Basis Akuntansi Dalam SAP

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang diperoleh harus diolah terlebih dahulu agar dapat dianalisis dan dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang ada pada bagian keuangan atau akuntansi di SKPD Provinsi Jawa Tengah. Jumlah responden yaitu sebanyak 48 responden. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari : usia, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Responden

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Kasubbag Keuangan	1 orang
2	Staf Kasubbag Keuangan	8 orang
3	Kabid Anggaran	1 orang
4	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	1 orang
5	Staf Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	5 orang
6	Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 orang
7	Staf Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 orang
8	Kasubbid Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	1 orang
9	Staf Kasubbid Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	5 orang
10	Kabid Akuntansi	1 orang
11	Kasubbid Akuntansi Bidang Pemerintahan	1 orang
12	Staff Kasubbid Akuntansi Bidang Pemerintahan	7 orang
13	Kasubbid Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 orang
14	Staff Kasubbid Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 orang
15	Kasubbid Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	1 orang
16	Staff Kasubbid Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	5 orang
	Jumlah	48 orang

Sumber : Data primer yang telah diperoleh (SPSS,2022)

Jumlah Responden sebanyak 48 orang dapat didistribusikan berdasarkan usia pada tabel 2

Tabel 2
Jumlah Responden

NO	KETERANGAN	Frekwensi	Persentase
1	25 tahun – 35 tahun	8 orang	15%
2	36 tahun – 45 tahun	12 orang	25%
3	46 tahun – 55 tahun	28 orang	60%
	Jumlah	48 orang	100%

Sumber : Data primer yang telah diperoleh (SPSS,2022)

Dari table 2 diatas dapat kita lihat bahwa dominan pegawai atau staff yang ada pada SKPD provinsi Jawa Tengah berusia 46-55 tahun dengan persentase 60%. Hal tersebut menurut penulis berpengaruh kepada pengisian kuesioner yang diberikan memiliki jawaban yang sebenarnya dikarenakan pemahan para responden terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan sangat baik karena masa bekerja para responden yang telah lama di bidang keuangan pemerintahan.

Responden sebanyak 48 orang dapat dideskripsikan lagi berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Responden

NO	KETERANGAN	Frekwensi	Persentase
1	Pria	32 orang	67 %
2	Wanita	16 orang	33 %
	Jumlah	48 orang	100%

Sumber : Data primer yang telah diperoleh (SPSS,2022)

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase Pria 67% dengan jumlah 32 orang dan wanita 33% dengan jumlah 16 orang total 48 orang (100%). Pengelompokan berdasarkan kelamin dapat kita lihat bahwa pria lebih banyak yaitu 67% dibandingkan dengan kaum wanita yang ada di bidang system keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sistem Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang telah disosialisasikan oleh pemerintah kepada karyawan atau staff bagian keuangan SKPD. Kuesioner yang diberikan terdiri dari beberapa sub bagian yang tiap sub memiliki isi kandungan seperti kesesuaian sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah, prosedur pencatatan akuntansi yang dilakuakn berlaku secara umum, kemudian pembuatan laporan keuangan apakah sudah dilakukan secara periodik. Untuk mengetahui jawaban dari para responden penulis menjabarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden

Tabel 4
Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan

No	Item Pertanyaan		Alternatif Jawaban					Mean
			SS	S	KS	TS	STS	
1	Sistem Akuntansi Keuangan pada Dinas ini Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	F	20	28	0	0	0	4,4166
		%	41.7	58.3	0	0	0	

Akumulasi Jawaban	F	20	28	0	0	0	4.4166
	%	41.7	58.3	0	0	0	

Sumber : Data primer yang telah diperoleh (SPSS,2022)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebanyak 28 orang (58,3%), kemudian 20 orang (41,7%) menjawab sangat setuju, dengan nilai rata-rata sebesar 4.4166 maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada SKPD provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tabel 5
Prosedur Pencatatan Akuntansi dengan Pencatatan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum

No	Item Pertanyaan		Alternatif Jawaban					Mean
			SS	S	KS	TS	STS	
1	Setiap transaksi keuangan pada dinas ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi	F	23	25	0	0	0	4.4791
		%	47.9	52.1	0	0	0	
2	Pada dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan	F	20	28	0	0	0	4.4166
		%	41.7	58.3	0	0	0	
3	Setiap transaksi keuangan pada dinas ini didukung oleh bukti transaksi	F	27	21	0	0	0	4.5625
		%	56.3	43.7	0	0	0	
4	Pada dinas ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis	F	21	24	3	0	0	4.3750
		%	43.8	50.0	6.2	0	0	
5	Pada dinas ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi	F	26	20	2	0	0	3.8750
		%	54.2	41.7	4.1	0	0	
Akumulasi Jawaban		F	117	118	5	0	0	4.4666
		%	48.8	49.2	2.1	0	0	

Sumber : Data primer yang telah diperoleh (SPSS,2022)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju sebanyak 49.2%, kemudian sangat setuju 48.8%, disusul kurang setuju sebanyak 2.1%, dengan nilai rata-rata sebesar 4.4666 yang berarti bahwa responden sangat setuju dengan prosedur pencatatan akuntansi pada SKPD provinsi Jawa Tengah, yang dapat diartikan bahwa prosedur pencatatan akuntansi pada SKPD tingkat provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Tabel 6
Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan secara Periodik

No	Item Pertanyaan		Alternatif Jawaban					Mean
			SS	S	KS	TS	STS	
1	Pada dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya	F	24	24	0	0	0	4.5000
		%	50.0	50.0	0	0	0	
2	Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan	F	22	24	2	0	0	4.4167
		%	45.8	50.0	4.2	0	0	
3	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi	F	26	22	0	0	0	4.5417
		%	54.2	45.8	0	0	0	
4	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.	F	29	19	0	0	0	4.6042
		%	60.4	39.6	0	0	0	
Akumulasi Jawaban		F	101	91	2	0	0	4.5103
		%	52.1	46.9	1.0	0	0	

Sumber : Data primer yang telah diperoleh (SPSS, 2022)

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa 52.1% responden sangat setuju, 46.9% sangat setuju, dan 1.0% kurang setuju, dengan nilai rata-rata sebesar 4.5103 yang berarti bahwa pembuatan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh SKPD provinsi Jawa Tengah telah dilaporkan secara periodik dengan baik.

4.2 Deskripsi Sistem Keuangan Pemerintah Daerah

Mengenai Kualitas laporan keuangan dapat dianggap baik apabila laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan handal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk mengetahui apakah SKPD provinsi Jawa Tengah sudah termasuk kedalam golongan kualitas yang baik atau tidak baik, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Laporan Keuangan harus Handal, Relevan, Dapat Dipahami dan Dibandingkan

No	Item Pertanyaan		Alternatif Jawaban					Mean
			SS	S	KS	TS	STS	
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu.	F	19	23	6	0	0	4.271
		%	39.6	47.9	12.5	0	0	
2	Laporan Keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang	F	9	33	6	0	0	4.063
		%	18.8	68.7	12.5	0	0	

3	Penyajian/penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi	F	20	22	6	0	0	4.292
		%	41.7	45.8	12.5	0	0	
4	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan	F	27	21	0	0	0	4.563
		%	56.3	43.7	0	0	0	
5	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan	F	23	22	3	0	0	4.604
		%	47.9	45.8	6.3	0	0	
6	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda	F	4	15	19	10	0	3.271
		%	29.2	31.3	39.6	20.8	0	
7	Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu	F	9	21	4	14	0	3.521
		%	18.8	43.7	8.3	29.2	0	
8	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	F	12	31	5	0	0	4.146
		%	25.0	64.6	10.4	0	0	
9	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama	F	18	25	5	0	0	4.271
		%	37.5	52.1	10.4	0	0	
10	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas	F	32	16	0	0	0	4.667
		%	66.7	33.3	0	0	0	
11	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	F	20	27	1	0	0	4.396
		%	41.7	56.3	2.0	0	0	
Akumulasi Jawaban		F	193	256	55	24	0	4.171
		%	36.6	48.5	10.4	4.5	0	

Sumber : Data primer yang telah diperoleh (SPSS,2022)

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa 36.6% responden sangat setuju, 48.5% menyatakan setuju, 10.4% kurang setuju dan 4.5% tidak setuju, dengan nilai rata-rata sebesar 4.171 yang dapat diartikan bahwa responden sudah setuju secara keseluruhan pelaporan keuangan sudah handal, relevan, dapat dipahami dan dibandingkan, sehingga dapat diketahui bahwa pelaporan keuangan sudah memenuhi kriteria handal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

4.3 Analisis Jawaban Responden

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Kuisisioner terdiri dari 21 butir pernyataan dengan perincian 10 butir pernyataan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan 11 butir pernyataan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah deskriptif.

Opsinya untuk menentukan bobot dari setiap jawaban yang diberikan responden akan diberikan skor (nilai) pada setiap jawaban yaitu arah pernyataan untuk pernyataan positif akan diberi skor 5-4-3-2-1 dengan menggunakan skala yang dapat dilihat sebagai berikut:

Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)

Skor 3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS) Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)

Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

Berdasarkan hasil jawaban 48 responden maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan, memperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,4166 artinya Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan baik.
2. Prosedur pencatatan akuntansi dengan Pencatatan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum dengan 4 item pertanyaan, 48 responden juga memberikan jawaban baik, dengan rata-rata jawaban 4,6666
3. Pembuatan Laporan Keuangan yang dilaporkan secara periodek, dari 48 responden dengan 4 item pertanyaan juga memberikan hasil yang baik, dengan rata-rata jawaban responden 4,5103
4. Gambaran mengenai kualitas Laporan keuangan juga baik bila dilihat dari sisi handal, relevan, dapat dipahami dan dibandingkan karena rata-rata jawaban responden 4,171 dengan 11 item pertanyaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Variabel penelitian yang digunakan adalah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif. Dari total kuisisioner yang disebar sebanyak 48 kuisisioner, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di SKPD Provinsi Jawa Tengah sudah berada dalam kategori yang baik, kemudian laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Provinsi Jawa Tengah sudah berada dalam kategori yang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya untuk penelitian yang lebih baik lagi dan lebih luas sampel yang akan digunakan oleh peneliti selanjutnya dan untuk membantu pembentukan suatu laporan keuangan pada tiap SPKD Provinsi Jawa Tengah guna penyempurnaan kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi dari saat ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- A. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di BPKAD Jawa Tengah sudah baik, untuk itu khususnya pada SKPD provinsi Jawa Tengah yang menjadi subjek dalam penelitian ini perlu memperhatikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, baik dalam memahami dalam penggunaannya ataupun dalam hal mengetahui standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- B. Sebaiknya semua SKPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah selalu menjaga dan meningkatkan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sehingga menjadi baik dan transparan, guna terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.
- C. Sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik untuk menghadapi sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang akan datang.
- D. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan beberapa variabel yang relevan sehingga penelitian ini dapat lebih disempurnakan, misalnya Sistem Pengendalian Interen, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perubahan Status atau Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- E. Subyek penelitian dapat berbeda di BPKAD departemen lainnya dan wilayah lainnya kecuali Jawa Tengah
- F. Menggunakan alat analisis yang lebih baik tidak hanya deskriptif sehingga akan diperoleh hasil yang lebih akurat dalam pengambilan kesimpulan terutama keterkaitan antara variabel yang satu dengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Dwi Permadi, 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah*, Bandung. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, <http://www.bpk.go.id>
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, edisi 4, cetakan keempat. Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Halim, Abdul.2002. *Accounting Principle Boards*.Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Salemba- Empat
- Harto, Tantriani Sukmaningrum Puji. 2010. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” *jurnal akuntansi pemerintah*
- Haykal, 2007. Analisis Peran dan Fungsi SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja SKPD (Studi kasus Pada Pemkab Aceh timur).
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lalolo, Loina Krina P,2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Nordiawan Deddi, Rahmawati Maulidah dan Sondi Putra Iswahyudi,2007.*AkuntansiPemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- NurlanDarie, Ak,MSi., *PengelolaanKeuanganDaerah*, PT.Indeks Permata Puri Media,Jakarta,2009.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintahan No.58 Tahun 2005 Mengenai pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prof.Erlina,SE,MSi,PhD,Ak,CAAdkk,*AkuntansiKeuangan Daerah BerbasisAkruar*, Salemba Empat Jakarta,2009.
- Rohman, Abdulah.2009. “Pengaruh Implemenasi Sistem Akuntansi, PengelolaanKeuangan Daerah, Terhadap fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Sandy,2008, *Penerapan sistem Akuntansi Keuangan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*, Repositori.usu.ac.id,Medan.
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Saragih, Juli Panglina, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*.Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saufi, Iqbal Nasution, 2010. “Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara ”, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Soekarwo, 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip- Prinsip Good Financial Governance*. Penerbit airlangga University Press, Surabaya.

- Soesastro, Hadi.dkk. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sinaga, Sandy Sera, 2008. “Tinjauan Atas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Sugiyono. 2007.*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*.Bandung
- Syuriani, Elsa FiiTri, 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Di Kota padang.
- Uma SekaranResearch Methods For Business SalembaEmpat, Jakarta,2006.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Umar, Husein, 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.